

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Amos Joan Ramon Lubis*; Parmadi; Siti Aminah

Prodi. Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*Email korespondensi: Amoslubis123@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: 1) the degree of fiscal decentralization in East Tanjung Jabung Regency as measured by the ratio of fiscal autonomy degrees, regional financial independence ratio and regional financial dependency ratio; 2) the effect of economic growth on the degree of fiscal decentralization of East Tanjung Jabung Regency. The data used are secondary data of Tanjung Jabung Timur Regency during the period 2001 - 2015. Data were analyzed descriptively using fiscal decentralization ratios and using simple linear regression models. The results of the study found: 1) The degree of fiscal autonomy and the regional financial independence ratio of the Tanjung Jabung Regency are classified as very low, while the regional financial dependency ratio is very high; 2) Economic growth has a significant and positive influence on the degree of fiscal autonomy and the financial independence ratio of the East Tanjung Jabung Regency. On the contrary it does not have a significant effect on the regional financial dependency ratio.

Keywords: *Economic growth, Fiscal decentralization, Regional autonomy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diukur melalui rasio derajat otonomi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah; 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2001 – 2015. Data dianalisis dengan secara deskriptif menggunakan rasio-rasio desentralisasi fiskal serta menggunakan model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menemukan: 1) Derajat otonomi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong dalam kategori sangat rendah, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi; 2) Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap derajat otonomi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebaliknya tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah.

Kata kunci : Pertumbuhan ekonomi, Desentralisasi fiskal, Otonomi daerah

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mengatasi ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintah pusat, ketidakstabilan makro ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli menyatakan bahwa sasaran utama desentralisasi adalah dapat membantu mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah serta desentralisasi merupakan sebuah solusi agar pemerintah dapat lebih efisien dalam menjalankan roda pemerintahannya dari tingkat yang lebih rendah (*trickle down effect*) sehingga lebih cepat tanggap membantu masyarakat di daerah tersebut agar perekonomian dapat dijalankan tanpa adanya hambatan-hambatan yang dapat menunda pertumbuhan ekonomi di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Selain itu, desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat

Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan akan semakin besar. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja yang tersedia memaksa orang untuk menentukan spesialisasi yang akan meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas, maka uang yang dihasilkan untuk jam kerja yang sama akan lebih besar. Uang tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM generasi berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga dalam beberapa generasi kemudian, distribusi pendapatan makin membaik serta kesejahteraan makin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi disuatu wilayah/daerah tertentu dalam waktu satu tahun. Dalam hal ini kondisi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan 2010 selama tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi ini didukung dengan adanya peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diukur melalui rasio derajat otonomi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah; 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

METODE

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2001 – 2015 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data mencakup total penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, alokasi

dana pusat dan pertumbuhan ekonomi. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi

Analisis data

- a. Untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah, digunakan formulasi derajat otonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2007) :

$$DOF_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

di mana :

DOF = Rasio Derajat Otonomi Fiskal tahun t

PAD = Nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD = Nilai Total Pendapatan Daerah tahun t

Semakin tinggi nilai rasio desentralisasi anggaran pendapatan daerah maka semakin terdesentralisasi daerah yang bersangkutan. Adapun ukuran interval rasio diberikan pada Tabel 1

Tabel 1. Interval rasio derajat otonomi fiskal

Nilai rasio (%)	Kriteria DOF
0 – 20	Rendah sekali, Tidak otonom
20,1 – 40	Rendah, Kurang otonom
40,1 – 60	Cukup tinggi, Cukup otonom
60,1 – 80	Tinggi, otonom
80,1 – 100	Sangat tinggi, otonom daerah sangat tinggi

Sumber : Mahmudi (2007)

- b. Untuk mengukur derajat kemandirian keuangan daerah digunakan formulasi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2007) yaitu :

$$RKD_t = \frac{PAD_t}{ADD_t} \times 100\%$$

di mana :

RKD_t = Ratio Kemandirian Keuangan Daerah tahun t

PAD = Nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun t

ADD_t = Nilai Alokasi Dana Bantuan Pusat tahun t

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan anggaran pendapatan daerah maka pengelolaan keuangan daerah juga semakin mandiri. Ukuran interval rasio diberikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Interval rasio kemandirian keuangan daerah

Nilai rasio (%)	Kriteria RKK
0 – 20	Rendah sekali, Tidak Mandiri
20,1 – 40	Rendah, Kurang mandiri
40,1 – 60	Cukup tinggi, Cukup mandiri
60,1 – 80	Tinggi, Mandiri
80,1 – 100	Sangat tinggi, kemandirian keuangan sangat tinggi

Sumber : Mahmudi (2007)

- c. Untuk mengukur derajat ketergantungan keuangan daerah digunakan formulasi yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007) :

$$RKKD_t = \frac{DBP_t}{TPD_t} \times 100\%$$

di mana :

RKKD_t = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tahun t

DBP = DanaBantuan Pusat tahun t

TPD = Total Pendapatan Daerah tahun t

Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan anggaran pendapatan daerah maka pengelolaan keuangan daerah juga semakin mandiri. Ukuran interval rasio diberikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Interval rasio ketergantungan keuangan daerah

Nilai rasio (%)	Kriteria RKKD
0 – 20	Rendah sekali, Tidak tergantung
20,1 – 40	Rendah, Tergantung Rendah
40,1 – 60	Cukup tinggi, Cukup Tergantung
60,1 – 80	Tinggi, Tergantung Tinggi
80,1 – 100	Sangat tinggi, sentralisasi

Sumber : Mahmudi (2007)

- d. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rasio desentralisasi fiskal digunakan tiga model regresi sederhana dengan persamaan berikut:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + e_i$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e_i$$

$$Y_3 = \omega_0 + \omega_1 Y_1 + e_i$$

Dimana:

Y_1 = Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Y_2 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD)

Y_3 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)

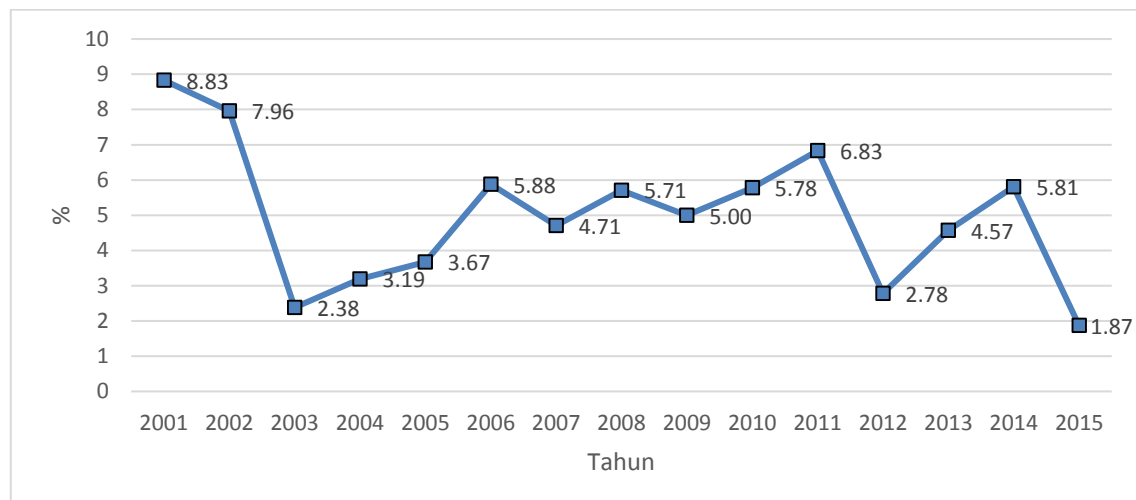
X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB sektor ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2001 – 2015 adalah sebesar 5,00 persen pertahun. Angka pertumbuhan ini relatif bervariasi. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2001 sebesar 8,83 persen pertahun sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2015 sebesar 1,87 persen pertahun.

Secara terperinci, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2001 – 2015 diberikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 – 2015 (ADHK 2000)

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Analisis derajat otonomi fiskal

Rasio derajat otonomi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2001-2015 memiliki angka rerata sebesar 3,72 persen, yang berarti bahwa anggaran pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun penelitian dapat dikatakan tidak terdesentralisasi, karena berada di bawah skala 20 persen.

DOF PAD tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu 4,86 persen dan terendah tahun 2006 2,30 persen. DOF tertinggi pada tahun 2003 di sebabkan oleh peningkatan PAD yang lebih besar dari peningkatan total penerimaan daerah. Sebaliknya DOF terendah pada tahun 2006 di sebabkan oleh peningkatan PAD lebih kecil dari peningkatan total penerimaan daerah.

Tabel 4. Rasio derajat otonomi fiskal kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001-2015

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF	Keterangan
2001	6.013.660.000	139.296.000.800	4,32	Rendah Sekali
2002	6.682.956.000	142.521.081.200	4,69	Rendah Sekali
2003	7.422.500.000	152.622.082.800	4,86	Rendah Sekali
2004	7.956.000.000	188.707.840.500	4,22	Rendah Sekali
2005	8.687.420.000	247.862.934.000	3,50	Rendah Sekali
2006	9.908.210.000	430.036.300.000	2,30	Rendah Sekali
2007	10.124.380.000	379.730.568.000	2,67	Rendah Sekali
2008	19.002.264.000	451.060.737.400	4,21	Rendah Sekali
2009	19.956.728.000	490.497.482.000	4,07	Rendah Sekali
2010	19.772.307.000	617.021.627.600	3,20	Rendah Sekali
2011	24.372.826.330	613.403.519.970	3,97	Rendah Sekali
2012	29.435.684.059	754.674.305.590	3,90	Rendah Sekali
2013	27.485.501.000	808.273.451.400	3,40	Rendah Sekali
2014	28.936.200.000	871.795.142.318	3,32	Rendah Sekali
2015	29.753.420.000	932.886.250.259	3,19	Rendah Sekali
Rata-Rata	16.656.562.625	481.359.288.256	3,72	Rendah Sekali

Sumber : *Tanjung Jabung Timur Dalam Angka (data diolah)*

Analisis kemandirian keuangan daerah

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2001-2015 adalah sebesar 3,94 persen. Persentase rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terkecil terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,42 persen dan rasio kemandirian keuangan terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 5,28 persen.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan selama tahun 2001-2015 pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah yakni sebesar 3,85 persen dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan kriteria daerah tidak mandiri atau peranan pemerintah sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0-20 persen. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintahan pusat.

Tabel 5. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001-2015

Tahun	PAD (Rp)	Daper (Rp)	RKD	Keterangan
2001	6.013.660.000	130.850.667.300	4,60	Rendah Sekali
2002	6.682.956.000	134.468.772.000	4,97	Rendah Sekali
2003	7.422.500.000	140.656.527.000	5,28	Rendah Sekali
2004	7.956.000.000	174.947.304.000	4,55	Rendah Sekali
2005	8.687.420.000	233.149.969.000	3,73	Rendah Sekali
2006	9.908.210.000	410.251.840.000	2,42	Rendah Sekali
2007	10.124.380.000	363.994.490.000	2,78	Rendah Sekali
2008	19.002.264.000	425.221.982.000	4,47	Rendah Sekali
2009	19.956.728.000	464.173.979.000	4,30	Rendah Sekali
2010	19.772.307.000	591.416.852.000	3,34	Rendah Sekali
2011	24.372.826.330	583.381.446.940	4,18	Rendah Sekali
2012	29.435.684.059	718.684.301.090	4,10	Rendah Sekali
2013	27.485.501.000	774.035.600.000	3,55	Rendah Sekali
2014	28.936.200.000	835.800.441.918	3,46	Rendah Sekali
2015	29.753.420.000	890.230.450.030	3,34	Rendah Sekali
Rata-Rata	16.656.562.625	458.084.308.152	3,94	Rendah Sekali

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur (data diolah)

Analisis ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2001-2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 94,71 persen. Persentase ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar sebesar 95,87 persen dan ketergantungan keuangan terkecil terjadi pada tahun 2003 sebesar 92,16 persen. Walaupun demikian ketergantungan masih tergolong sangat tinggi karena berada di kisaran 81-100 persen.

Tabel 6. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001-2015

Tahun	Daper	TPD	RKKD	Keterangan
2001	130.850.667.300	139.296.000.800	93,94	Sangat Tinggi
2002	134.468.772.000	142.521.081.200	94,35	Sangat Tinggi
2003	140.656.527.000	152.622.082.800	92,16	Sangat Tinggi
2004	174.947.304.000	188.707.840.500	92,71	Sangat Tinggi
2005	233.149.969.000	247.862.934.000	94,06	Sangat Tinggi
2006	410.251.840.000	430.036.300.000	95,40	Sangat Tinggi
2007	363.994.490.000	379.730.568.000	95,86	Sangat Tinggi
2008	425.221.982.000	451.060.737.400	94,27	Sangat Tinggi
2009	464.173.979.000	490.497.482.000	94,63	Sangat Tinggi
2010	591.416.852.000	617.021.627.600	95,85	Sangat Tinggi
2011	583.381.446.940	613.403.519.970	95,11	Sangat Tinggi
2012	718.684.301.090	754.674.305.590	95,23	Sangat Tinggi
2013	774.035.600.000	808.273.451.400	95,76	Sangat Tinggi
2014	835.800.441.918	871.795.142.318	95,87	Sangat Tinggi
2015	890.230.450.030	932.886.250.259	95,43	Sangat Tinggi
Rata-Rata	458.084.308.152	481.359.288.256	94,71	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur (data diolah)

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Estimasi model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Estimasi model derajat otonomi fiskal

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig	
Constant	2,049	2,401	0,032	$R^2 = 0,485$
X	0,304	2,000	0,067	

Berdasarkan estimasi diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 2,000. dengan signifikansi $0,067 < \alpha = 0,1$. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpengaruh signifikan dan positif terhadap derajat otonomi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nilai koefisien sebesar 0,304 artinya kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan derajat otonomi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,304 persen.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,485 pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan derajat otonomi fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 48,5 persen sedangkan sisanya 51,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Estimasi model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Estimasi model rasio kemandirian keuangan daerah

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig t hitung	
Constant	2,088	2,205	0,046	$R^2 = 0,484$
X	0,336	1,993	0,068	

Berdasarkan estimasi diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,993 dengan signifikansi $0,068 < \alpha = 0,1$. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpengaruh signifikan dan positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nilai koefisien sebesar 0,336 artinya kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,336 persen.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,484 pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan derajat otonomi fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 48,4 persen sedangkan sisanya 51,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selama

Estimasi model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Estimasi model rasio ketergantungan keuangan daerah

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig t hitung	
Constant	96,420	65,583	0,000	$R^2 = 0,313$
X	-0,311	-1,188	0,256	

Berdasarkan estimasi diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -1,188 dengan signifikansi $0,256 > \alpha=0,1$. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2001-2015 dilihat dari derajat otonomi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori sangat rendah begitu pula dengan rasio ketergantungan keuangan daerah yang masih sangat tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2001-2015 memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap derajat otonomi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah.

Saran

Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor ekonomi potensial yang memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan daerah seperti peningkatan sektor industri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu terus meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, terutama pendapatan dari pajak bumi dan bangunan serta mengoptimalkan pendapatan dari bantuan pusat guna modal meningkatkan potensi hasil bumi dari perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, E., Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37 - 50
- Badan Pusat Statistik, 2001-2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia*. Jakarta: BPS Pusat
- Badan Pusat Statistik, 2001-2015. *Tanjung Jabung Timur Dalam Angka*. Jambi: BPS Jambi.
- Demora, V., (2016), Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 13 – 20
- Khodafi, M., (2016), Analisis kinerja keuangan dari sisi belanja daerah di Kabupaten Batang Hari. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(2)
- Mahmudi, 2007. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi, 2010. *Menejemen kinerja sektor publik* (edisi 2). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Supriyadi, Delis, A., Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(1). 1 - 10
- Umiyati, E. (2012). Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Dalam Implementasi Otonomi Daerah di Propinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 1(5), 15 – 21
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta